

# BAB 1

## PENDAHULUAN: Menguak tantangan Aceh pasca-2004

Patrick Daly

Bagaimana kita dapat mencapai rekonstruksi dan pembangunan pascabencana yang membangun kembali dan sekaligus melindungi rakyat dari potensi kerugian dalam musibah-musibah pada masa mendatang? Bagaimana kita bisa memelihara perdamaian yang meredakan penderitaan lama dan mengurangi kemungkinan timbulnya permusuhan baru antara pihak-pihak yang memiliki sejarah panjang perseteruan? Inilah dua dari tantangan-tantangan utama yang dihadapi Aceh selepas tsunami Samudera Hindia 2004 dan Kesepakatan Perdamaian Helsinki 2005 yang mengakhiri permusuhan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut jelas penting bagi rakyat Aceh yang telah mengalami konflik dan pengucilan puluhan tahun, kehancuran mendadak akibat tsunami, serta perih dan susahny proses berkabung dan membangun kembali. Masa depan Aceh telah diubah secara dramatis oleh berbagai kejadian sejak Desember 2004, dan akan butuh waktu bertahun-tahun, kalau bukan berpuluh-puluh tahun, untuk menjadikan segala sesuatunya normal kembali.

Pertanyaan-pertanyaan di atas juga sangat penting bagi komunitas internasional yang lebih luas. Pengalaman Aceh tak syak lagi akan mempengaruhi tekstur dan hasil dari berbagai respons pascabencana dan proses perdamaian di seluruh dunia pada masa depan. Sejumlah besar kader pekerja bantuan kemanusiaan, orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian konflik, serta para penasihat rekonstruksi dan pembangunan, sudah mulai memboyong pengalaman mereka dari Aceh ke daerah berikutnya di mana mereka ditempatkan atau ditugaskan. Segenap generasi staf LSM, pembuat kebijakan dan akademisi, telah dipengaruhi oleh apa yang terjadi di seputar Samudera Hindia akibat serbuan tsunami. Berbagai upaya di Aceh – yang terkait dengan konflik maupun tsunami – telah banyak didokumentasikan dengan baik dan

relatif transparan, sehingga membuka kemungkinan bagi jenis penelitian dan penilaian secara mendalam, yang seringkali tidak mungkin dilakukan di penghujung banyak insiden trauma berskala besar. Sejumlah besar sumberdaya yang dikucurkan ke daerah ini untuk menangani konflik dan membangun kembali kehidupan para korban perang dan bencana yang porak-poranda, memerintahkan – dan sesungguhnya mewajibkan – adanya refleksi komprehensif yang mempertanyakan standar-standar lama dan membuahkan pengetahuan baru.

Pengetahuan baru tersebut tidak boleh terbatas pada sekadar ‘hikmah pelajaran’ praktis atau solusi generik yang dapat secara otomatis diterapkan ketika berlangsung krisis besar berikutnya. Berbagai organisasi, baik dari pihak pemerintah maupun kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sudah bersusah-payah menghimpun penilaian tentang upaya mereka di Aceh. Penilaian-penilaian ini banyak tersedia, dan sejumlah kontributor buku ini telah menggeluti produksi analisis-analisis semacam itu. Sementara banyak di antaranya yang jelas sangat berharga dan menjadi bagian yang diperlukan dari kontrol kualitas dan proses pengawasan bagi organisasi-organisasi bersangkutan, penilaian-penilaian tersebut juga memiliki banyak keterbatasan. Ada berbagai tekanan di dunia kebijakan yang menyodorkan kendala waktu yang serius pada penilaian-penilaian semacam itu, dan banyak organisasi biasanya tidak memiliki mandat untuk menekuni kajian jangka-panjang yang dibutuhkan agar dapat lebih memahami berbagai implikasi dan konsekuensi pekerjaan mereka. Selain itu, sulit diharapkan adanya penelitian dan kritik yang benar-benar tidak bias mengenai organisasi-organisasi dan bidang-bidang kemanusiaan, rekonstruksi dan pembangunan lebih luas, dari orang-orang yang berkecimpung dalam, atau dibiayai oleh, organisasi-organisasi tersebut.

Sayangnya, lumrah pula bahwa orang-orang yang memiliki bertahun-tahun pengalaman berharga di lapangan dan bekerja dengan organisasi-organisasi pertolongan darurat, bantuan dan pembangunan, tidak didorong untuk memahami pekerjaan mereka dari perspektif yang benar-benar kritis, dan hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk mencerna pengalaman mereka dengan baik dan menyaring apa yang telah mereka pelajari sebelum pindah ke ‘situasi krisis’ berikutnya. Sebagaimana banyak orang di antara rombongan awal yang tiba di Aceh telah memetik pelajaran di Timor Timur atau Balkan, banyak di antara mereka yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir dengan berkiperah di kawasan Samudra Hindia tak pelak lagi akan melanjutkan langkahnya ke Afghanistan, Darfur, Haiti, Chile, atau di manapun muncul keadaan darurat yang menyita perhatian global. Rotasi bakat ini menimbulkan

pandangan yang terpecah-pecah tentang proses-proses kompleks jangka-panjang yang dibutuhkan untuk membentuk kembali komunitas-komunitas dan masyarakat-masyarakat yang hancur berantakan. Percakapan singkat dengan staf LSM besar manapun akan menunjukkan dengan jelas bahwa banyak orang pandai dan berpengalaman memiliki kekayaan pemahaman yang tidak pernah diungkapkan secara resmi karena berbagai kendala struktural dan institusional.

Sangat sulit pula mendapatkan hasil analisis yang mantap dan bermakna dari para akademisi yang dapat mengambil hikmah dari diskusi-diskusi praktis tentang situasi pascakonflik dan pascabencana. Akademisi dibebani berbagai rangkaian kendala institusional mereka sendiri. Tidak seperti sejawat mereka di dunia kebijakan dan LSM, sedikit sekali akademisi dari disiplin keilmuan apapun yang berkesempatan menghabiskan cukup banyak waktu di lapangan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika yang mendasari situasi pascatrauma. Jarak dan kerenggangan hubungan bukan saja menyodorkan perspektif yang berbeda, boleh jadi perspektif yang berguna dan perlu, tetapi juga mereduksi keterlibatan yang berlangsung terus-menerus, setiap hari, dengan situasi-situasi bersangkutan. Refleksi teoretis yang ditulis dengan mengandalkan laporan kemajuan yang disusun LSM, dan dilengkapi kunjungan singkat ke lapangan, tidak otomatis melahirkan pemahaman baru yang mendalam. Lagi pula, kebanyakan peneliti yang dipekerjakan oleh lembaga akademis tidak harus membuat keputusan-keputusan sulit dalam kondisi kurang optimal, sebagaimana yang harus dilakukan para praktisi.

Sifat dunia akademis yang terpecah-pecah menimbulkan fokus-fokus yang sangat terspesialisasi pada pemilihan aspek rekonstruksi dan situasi pascakonflik. Tidak mudah menyatukan dan mempertahankan berbagai jenis kemitraan multidisiplin yang diperlukan untuk membina penelitian yang lebih holistik tentang masalah-masalah yang luar biasa kompleks. Selain itu, hasil penelitian sering butuh waktu bertahun-tahun untuk melewati berbagai ulasan dari kalangan akademis dan proses publikasi, dan akhirnya muncul dalam jurnal atau buku suntingan yang jarang dibaca oleh praktisi, atau bahkan oleh akademisi lain dari disiplin-disiplin berbeda yang menggarap masalah berlingkup luas yang sama. Hal ini dapat dengan mudah dibuktikan kebenarannya dengan melirik rak buku pekerja LSM di lapangan, yang sering memuat sedikit sekali buku yang terbilang esensial bagi pendalaman di bidangnya. Ketimbang menemukan kumpulan artikel atau buku karya akademisi, jauh lebih mungkin menjumpai buku frase bahasa setempat, buku panduan *Loneley*

*Planet*, mungkin *The Shock Doctrine* Naomi Klein, dan dalam kasus Aceh, *Verandah of violence* Anthony Reid.

Jelaslah bahwa pemahaman kita tentang situasi pascakonflik dan pascabencana menghadapi batasan-batasan institusional serius dari semua sisi, yang perlu diatasi. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan membina interaksi yang lebih hakiki antara praktisi dan akademisi, yang melibatkan pihak internasional, nasional dan 'lokal'. Inilah sebagian dari logika di balik Konferensi Internasional Pertama untuk Kajian Aceh dan Samudera Hindia yang diselenggarakan di Banda Aceh pada Februari 2007, yang menjadi titik awal penyusunan buku ini. Sebagai tambahan, kiranya penting untuk menemukan cara mempertemukan berbagai pengalaman berharga dan perspektif anggota komunitas-komunitas ini dalam sebuah dialog bersama yang konstruktif. Sayangnya, format standar yang dipakai masing-masing pihak untuk 'menerbitkan' tidak serta-merta mendukung upaya semacam ini. Organisasi-organisasi besar menginginkan penilaian pragmatis dan terfokus yang mudah diterjemahkan ke dalam praktik, sementara jurnal akademik menghendaki pembahasan yang kontekstual dan seringkali lebih abstrak tentang berbagai gagasan. Ujung-ujungnya, berbagai lingkaran akademisi dan profesional yang berbeda-beda, tetapi menggarap isu-isu yang sama, kerap tidak terjembatani antara satu sama lain.

Tujuan kami dengan buku ini adalah menyediakan ruang bagi jenis-jenis dialog yang sering tidak dilakukan tersebut. Para penyumbang artikel buku ini diminta menuliskan beragam pengalaman mereka di Aceh untuk menguak sejumlah konsep fundamental yang mendasari pemulihan komunitas, rekonsiliasi, dan pemerintahan – sekadar menyebut beberapa di antaranya. Dalam proses penyuntingan, kami menghargai perbedaan gaya dan standar yang digunakan para penulis, dan memberikan keleluasaan pada beraneka-macam kontribusi tulisan. Berbagai sumbangan artikel tersebut meliputi makalah penelitian akademis sampai penilaian kebijakan yang lebih luas serta refleksi personal dan profesional. Untuk mulai memahami apa yang terjadi di Aceh sejak 2004, semua suara dan perspektif tersebut perlu disimak.

## Isi buku

Buku ini dibuka dengan bab yang ditulis oleh Kerry Sieh, profesor geologi terkemuka, yang menyarikan proses-proses fisik yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Artikelnya memberikan lingkup temporal pada buku ini, dan membentangkan arena bagi pembahasannya.

pembahasan berikutnya mengenai rekonstruksi pascatsunami. Sieh mengutarakan kerawanan yang berkelanjutan di daerah ini, dan kerentanan terhadap kejadian-kejadian seismik berskala besar pada masa depan. Kerja yang dilakukannya di daerah ini bukan saja bertujuan menghasilkan data ilmiah tentang sifat ketidakstabilan di daerah ini, tetapi juga mencakup program berjangkauan ke luar yang signifikan, dengan upaya-upaya pemberian informasi kepada penduduk di tingkat komunitas mengenai hasil penelitian timnya. Himbauannya untuk lebih mengintegrasikan penelitian ilmiah dan akademik dengan program-program berjangkauan ke luar adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil-hasil dan informasi yang berharga akan tersedia bagi penduduk yang paling berkepentingan, dan untuk menyusun upaya-upaya mitigasi bencana.

Setelah bab permulaan ini, buku dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama meninjau situasi pascabencana. Mengingat skala dan kompleksitas operasi-operasi di Aceh, nyaris mustahil meliputi semua sektor yang relevan. Meskipun demikian, bab-bab buku ini dipilih untuk memberikan suatu jangkauan perspektif tentang sejumlah faset kunci Aceh pascatsunami. Sayangnya, ada isu-isu penting yang tidak terliput dalam buku ini, seperti refleksi-refleksi tentang berbagai proses ekonomi yang dimunculkan oleh upaya pertolongan darurat dan rekonstruksi, serta hasil proses politik demokratisnya. Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang harus diakui ini, kami berharap buku ini akan memberi sumbangan yang mantap kepada apa yang kelak menjadi suatu kepustakaan yang bergairah dan luas.

### **Bagian I: Upaya-upaya rekonstruksi**

John Telford, konsultan bantuan dan pembangunan dan salah satu penulis Laporan Koalisi Evaluasi Tsunami (*Tsunami Evaluation Coalition* - TEC), mengikhtisarkan sejumlah temuan dan rekomendasi terpenting TEC, yang berfokus pada isu-isu yang dihadapi dalam banyak misi bantuan kemanusiaan berskala besar. Ia membahas pendanaan, mengilustrasikan bagaimana dinamika pendanaan yang tidak lazim di Aceh telah menimbulkan banyak sekali tumpang-tindih proyek, maupun organisasi-organisasi yang jauh melampaui keahlian sektoral dan regional mereka. Jika respons terhadap tsunami Aceh hendak digunakan untuk menyusun cetak-biru tentang bagaimana komunitas internasional turuntangan dalam berbagai musibah pada masa depan, maka penting sekali memahami isu-isu inti tentang kelayakan dan standar-standar ketika ada

sejumlah besar organisasi yang terlibat. Dalam tema yang mengemuka di sejumlah kontribusi tulisan di buku ini, Telford menekankan bahwa upaya bantuan perlu lebih dipadukan, dan dijalankan oleh warga di kawasan-kawasan yang terkena bencana – sesuatu yang terus-menerus disuarakan dalam retorika, namun sering jauh dari kenyataan dalam praktik.

Bab ini disusul dengan kontribusi lain yang membedah berbagai pengalaman TEC. Christopolos dan Wu, keduanya akademisi yang berpengalaman luas dalam konsultasi dan evaluasi proyek, menaruh perhatian pada Keterkaitan antara Pertolongan Darurat, Rehabilitasi dan Pembangunan (*Linking Relief, Rehabilitation and Development - LRRD*), yang menjadi unsur utama dalam situasi pascakonflik dan pascabencana. Sebagai bagian dari bab mereka, kedua penulis menampilkan argumen halus perihal manfaat memiliki kebijakan rekonstruksi dan pembangunan yang lebih terpadu, dan membahas sejumlah kekurangan institusional yang mengganggu keefektifan LRRD di Aceh. Salah satu kesimpulan utama mereka berkenaan dengan perlunya lebih membumikan upaya-upaya LRRD di dalam lembaga-lembaga lokal untuk menjamin kecocokan dan ketahanan. Dalam apa yang telah menjadi bagian standar dari kosakata pemulihan pascabencana, LRRD menekankan perlunya memusatkan perhatian bukan saja pada solusi cepat, tapi juga pada pendekatan terhadap berbagai kerawanan mendasar untuk melakukan mitigasi bencana pada masa mendatang.

Bab berikutnya, oleh Wolfgang Fengler, Ahya Ihsan, dan Kai Kaiser, meninjau mekanika pendanaan operasi-operasi pascatsunami dari perspektif yang lebih teknis. Mengingat skala anggarannya, dan tuntutan serius tentang akuntabilitas dan transparansi di Aceh, sejumlah lembaga dan dewan pengawas ditempatkan untuk memantau dan menjadi saksi penyaluran sumbangan dan bantuan, seperti *Multi-Donor Trust Fund*. Bab ini mengusung kekayaan pengalaman praktis yang diperoleh ketika Fengler menjadi pimpinan ekonom Bank Dunia di kantor Jakarta, yang mengurus pendanaan rekonstruksi berskala besar, dan membahas sejumlah dinamika kunci dalam pengelolaan aneka aliran dana yang membiayai upaya pemulihan di seputar dunia Samudra Hindia. Bab ini juga menyediakan titik awal untuk lebih memahami bagaimana operasi pascakonflik dan pascabencana dibiayai dan dikelola, sambil menekankan perbedaan fungsional dan bujeter antara situasi gawat-darurat kemanusiaan dan proyek pembangunan yang berjangka lebih panjang.

Daniel Fitzpatrick, yang menulis berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun menjadi ahli hukum pertanahan Indonesia dan

akademisi hukum, menyumbangkan bab yang meninjau isu kepemilikan dan hak atas tanah selepas tsunami. Banyak aspek dasar rekonstruksi disandarkan pada adanya rencana yang dapat dijalankan untuk memformalkan kepemilikan tanah di mana persoalan tersebut tidak jelas. Proses kompleks ini, yang dipimpin oleh inisiatif RALAS dengan Fitzpatrick menjadi bagian darinya, harus menghadapi paham informal dan paham adat tentang kepemilikan tanah, tuntunan hukum Islam, kehancuran dan ketiadaan catatan, serta jaringan kompleks pewarisan. Sebagai tambahan, perlu merujuk berbagai paham kepemilikan tanah yang sangat berbeda-beda itu dengan harapan dan persyaratan agen-agen donor, yang mencakup pertimbangan eksplisit terhadap isu gender dan keinklusan. Menariknya, penelitian Fitzpatrick mengisyaratkan bahwa penekanan pada penyertaan formal program-program 'peka gender' yang menyangkut hak atas tanah tidak selalu membawa hasil sebagaimana yang dimaksudkan. Sesungguhnya, dia mengemukakan bahwa dalam sejumlah kasus, program-program semacam itu justru menyingkirkan orang-orang yang hendak diikutsertakan.

Makalah Saiful Mahdi, yang ditulis berdasarkan pengalamannya sebagai akademisi dan sekaligus tokoh terpendang masyarakat sipil Aceh, meninjau bagaimana mobilitas telah digunakan oleh masyarakat Aceh untuk menanggapi konflik maupun tsunami. Selama masa-masa menghebatnya konflik, dan pada periode menyusul terjadinya tsunami, pengungsi domestik (*Internally Displaced Persons* – IDP) berkeliaran di seantero Aceh. Bab ini, yang dilandasi pemahaman mendalam tentang praktik-praktik budaya Aceh, menekankan orientasi kultural orang Aceh terhadap pergerakan, perjalanan dan keramahtamahan, dan modal sosial yang tersirat di dalam jaringan-jaringan desa. Dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang dampak upaya bantuan pada respons orang Aceh, dan mengemukakan bahwa banyak organisasi yang terlibat dalam kerja pascatsunami kurang memperhitungkan berbagai kekuatan komunal dan atribut kultural orang Aceh.

Terakhir, bab yang ditulis oleh Rodolphe De Koninck, Stephane Bernard dan Marc Girard memberi kita perspektif historis yang lebih dalam tentang sifat perubahan daratan Aceh. Analisis mereka tentang peta-peta lapisan hutan dan penggunaan tanah menunjukkan dengan jelas bahwa laju penghilangan hutan meningkat tajam dalam beberapa dekade terakhir. Barangkali ironis, sebagaimana yang mereka kemukakan, berakhirnya konflik membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi pembalakan hutan, karena lahan-lahan yang tadinya tidak dapat dijangkau menjadi lebih terbuka. Selain itu, upaya untuk menghubungkan tebaran

wilayah-wilayah Aceh juga membuka akses ke kawasan pedalaman berhutan lebat, sehingga memuluskan operasi pembalakan hutan. Hutan dan keragaman hayati Aceh mungkin merupakan salah satu ekosistem terpenting dan terutuh di seluruh Asia Tenggara, dan tekanan untuk memperluas pertanian dan memanen kayu hutan perlu diimbangi dengan pentingnya melestarikan hutan Aceh demi kehidupan sosial dan ekonomi jangka panjang.

## **Bagian II: Penyelesaian konflik**

Bagian kedua dari buku ini meninjau proses perdamaian yang mengakhiri konflik panjang antara GAM dan pemerintah Indonesia. Mengingat kronologi kejadian-kejadian di Aceh, wajar saja jika proses perdamaian dan respons pascatsunami menjadi tergabungkan dalam diskusi, dan juga, sampai kadar tertentu, dalam mandat administratif berbagai agen pemerintah maupun LSM. Walaupun keterkaitan ini memang memiliki validitas tertentu, dan keduanya akan tetap bertautan dalam imajinasi populer, penting untuk melihat dua hal tersebut sebagai rangkaian-rangkaian proses yang sangat berbeda, dan memahami dengan lebih sempurna dinamika unik masing-masing, serta wilayah-wilayah tumpang-tindihnya yang sejati. Semua penyumbang tulisan di bagian ini terlibat secara mendalam, dan dalam sejumlah kasus, secara pribadi, dalam konflik dan proses perdamaian itu.

Michael Morfitt, dalam bab yang terdokumentasikan dengan sangat baik, mengawali bagian ini dengan pembahasan komprehensif tentang bagaimana proses perdamaian tersebut dijalankan. Menggunakan aksesnya terhadap tokoh-tokoh kunci yang terlibat, ia merangkai narasi yang dimulai jauh sebelum tsunami; terentang melintasi beberapa pemerintahan presiden di Indonesia pasca-Orde Baru. Selain menyediakan ikhtisar yang sangat berguna tentang langkah-langkah yang bermuara pada penandatanganan Kesepakatan Helsinki pada 2005, dia dengan jernih memetakan berbagai tindakan dan pendirian pokok dari semua pemain inti yang terlibat, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dan para pimpinan GAM, sampai personil profesional dan ‘amatir’ dalam penyelesaian konflik. Cerita perdamaian di Aceh tidak boleh dinomorduakan menjadi dampak sekunder tsunami, tetapi harus dilihat dari apa yang dibutuhkan untuk mencapainya; begitu banyak upaya bersama oleh berbagai aktor, keputusan-keputusan yang berani dan pendirian-pendirian oleh jajaran pemimpin politik di kedua belah pihak yang bertikai, serta dukungan yang mendalam dan terlibat

dari komunitas internasional. Akhirnya, bab ini menyentuh implikasi-implikasi lebih luas dari proses perdamaian ini bagi Indonesia, dan reformasi-reformasi lebih jauh di dalam negeri.

Bab ini disusul dengan enak oleh penuturan yang lebih personal dari Peter Feith, yang mengawasi Misi Pemantauan Aceh (*Aceh Monitoring Mission*) yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Helsinki. Feith, tokoh kawakan di bidang penyelesaian konflik, menekankan sejumlah faktor kunci yang sedemikian jauh telah memungkinkan proses perdamaian berlangsung relatif sukses. Dia memberikan perspektif yang sangat berbeda, dan sekaligus menguraikan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan berhasilnya pemeliharaan perdamaian yang tahan lama. Sementara perdamaian di Aceh tidak mungkin pernah terjadi tanpa aksi-aksi dari jajaran pemimpin Aceh dan Indonesia, mustahil pula pelaksanaan Kesepakatan Helsinki bisa berjalan lancar tanpa kehadiran tim pemantau yang kuat dan efektif. Kehadiran pihak ketiga yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak, dan juga bisa menyanggah beban asistensi finansial, politik dan praktis Uni Eropa (EU), merupakan bagian pokok dari cerita pascakonflik di Aceh.

Bab yang ditulis oleh Leena Avonius mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh, dan meninjau isu-isu penting tentang keadilan dalam situasi pascakonflik. Bab ini menyediakan ikhtisar teoretis tentang berbagai-macam bentuk keadilan yang lumrah di dalam perbincangan mengenai situasi pascakonflik, seperti pengadilan hak asasi manusia, serta komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Sebagai tambahan, Avonius, yang menulis berdasarkan pengalaman pribadinya yang luas selama di Aceh, menyodorkan alasan kuat tentang perlunya lebih mengapresiasi dan bekerja di dalam konstruk-konstruk dan pemahaman-pemahaman orang Aceh tentang keadilan. Adanya sejumlah tingkatan otoritas yang berbeda-beda di dalam Aceh, termasuk lembaga pemerintahan ‘resmi’, mahkamah Syariah Islam, dan hukum adat tingkat desa sehingga mutlak perlu menemukan keseimbangan yang dipahami dan dapat diterapkan secara luas, dan sekaligus peka terhadap adat-istiadat, praktik, dan kerangka institusional masyarakat Aceh.

Terakhir, Rizal Sukma membahas tantangan-tantangan yang sangat luas dalam mengelola perdamaian di Aceh. Ketika sorotan internasional bergeser dari Aceh, semakin berat beban para aktor setempat untuk mengemban tanggung jawab secara penuh dan leluasa dalam membangun masa depan damai untuk Aceh, dan membina hubungan yang berhasil antara Aceh dan Jakarta. Bab ini menampilkan suatu perspektif Indonesia yang penting tentang berbagai peristiwa di seputar proses perdamaian,

dan juga perspektif yang terfokus tentang berbagai persoalan yang masih perlu diselesaikan untuk memastikan tetap stabilnya kawasan ini. Dalam hal ini, yang sangat menentukan adalah peningkatan terus-menerus kapasitas pemerintahan di Aceh, serta agenda pembangunan ekonomi yang lebih luas di seantero Aceh; khususnya di wilayah-wilayah yang meskipun tidak terlibat langsung dalam tsunami, tetap berkubang dalam kemiskinan.

Secara keseluruhan, dua bagian buku ini mengumandangkan sederet suara, semuanya dari orang-orang yang terlibat jauh dalam berbagai faset proses pascabencana dan pascakonflik di Aceh. Suara-suara ini mewakili pihak Indonesia, Aceh, dan internasional, serta akademisi, pekerja LSM dan pembuat kebijakan. Sejumlah perspektif menyoroti isu-isu institusional tingkat makro, sedangkan sebagian lainnya lebih berfokus pada isu-isu yang skalanya lebih kecil. Salah satu benang-merahnya adalah penekanan berulang-ulang di dalam bab-bab buku ini agar berbagai intervensi pascabencana dan pascakonflik diselaraskan dengan proses-proses 'lokal' untuk memaksimalkan kepemilikan 'lokal' dari ikhtiar-ikhtiar semacam itu. Hal ini memastikan tingkat investasi yang lebih tinggi oleh rakyat Aceh sendiri untuk mengambil tanggung-jawab dalam pembuatan keputusan pokok dan implementasi, yang bermuara pada terciptanya dan berkembangnya kapasitas. Lebih dari itu, untuk ketahanan jangka panjang, dipandang esensial untuk menyesuaikan semua program dengan berbagai cetak-biru yang dimiliki orang Aceh untuk kehidupan mereka pasca-2004. Dengan berakhirnya konflik, dan komunitas-komunitas bergerak maju dari trauma tsunami, Aceh kini memiliki wawasan yang lebih luas untuk membentuk masa depannya daripada titik lain manapun dalam sejarah mutakhirnya.